

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KAWASAN JALAN A.Y. PATTY KOTA AMBON

Oleh:

SULEMAN WATIANAN¹⁾

Email: sulemanwatianan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Kawasan Jalan A.Y. Patty Kota Ambon. Penelitian ini dimaksud untuk menjawab permasalahan, Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Di Kawasan Jalan A.Y. Patty Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 7 orang penelitian yang dipilih secara purposive. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, tahap reduksi data, penyajian data, dan tahap verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil Analisa dan kajian menemukan fakta bahwa Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Di Kawasan Jalan AY Patty Kota Ambon, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun terdapat sedikit peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya namun belum optimal. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh pada kurun waktu tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 sampai tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang kurang signifikan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ada yang salah dalam sistem pungutan yang dilakukan di lokasi perparkiran, apakah itu dari mekanisme yang tidak tepat yang berhubungan dengan petugas parkir serta sarana parkir serta sistemnya.

Kata Kunci : *Efektivitas, Peogelolaan Retribusi Parkir*

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintahan pusat, maka setiap daerah akan mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan tersebut,

¹⁾ *Suleman Watianan, Dosen Tetap Prodi. Ilmu Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

pemerintah daerah akan mengupayakan pendanaannya guna untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah melalui pendapatan asli daerah (PAD) yang berlaku pada masing-masing daerah. Menurut Marihot P. Siahaan (2011:5) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, perlu adanya sumber penerimaan daerah untuk pembiayaan.

Selanjutnya, menurut Victor Jusuf (2017:26) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan menurut Anggoro D. Danas (2017:45) menyatakan bahwa pemerintah daerah memperoleh pendapatan utama daerah (PAD) untuk pelaksanaan kebijakan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta untuk penggunaan sumber daya pemerintah daerah. Daerah maju adalah daerah dengan PAD yang tinggi karena ketika suatu daerah mencapai PAD yang tinggi, ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat untuk pendanaan berkurang.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari sumber penyimpanan yang terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah, artinya PAD merupakan ukuran terpenting pelaksanaan dan kapasitas penyelenggaraan daerah dan terwujudnya otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencerminkan kemandirian daerah yang statis dalam hal sumber daya keuangan. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikator derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Jln. A.Y. Patty Kota Ambon?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di kawasan Jln. A.Y. Patty maka ditingkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon.

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Efektivitas Pengelolaan

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif, baik sebagai input maupun output. Menurut Beni Pekei (2016:69) mengatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada

sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang menipukan sasaran yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Mandamu (2017:134) mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berfall tidaknya percapaian suam suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila gaisa mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Out) programi dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi upi yang dihasilkan terhadap petcapaian tujuan atau sasaran yang disentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "management" berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemn. Jadi manajemn itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling Menurut Stoner dalam Trianto (2007:271) menyatakan bahwa pengelolaan merupakan proses perencanal, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mariyana Rita dkk, (2004:1) mengatakan bahwa dalam proses manajemen (pengelolaan) terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organiring), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling).

3. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Adapun ada beberapa tujuan pengelolaan yang dapat dilihat yaitu:

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

B. Konsep Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Retribusi Parkir

Menurut Semdi Willy Tri Hardianto (2012:22) mengatakan bahwa Retribusi merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari apabila tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik. Retribusi parkir adalah kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi. Sedangkan menurut Damas D. Anggoro (2017:19) mengatakan bahwa Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi/pelayanan yang diberikan pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya, didasarkan atas peraturan yang berlaku. Juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa dimaksud. Juga retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Tjokrodinuljo (1996), agregat ialah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah, Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan daerah, untuk meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum: pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,
- b. Retribusi Jasa Usaha pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan,
- c. Retribusi Perizinan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah kepada kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Faktor Penghambat Retribusi Daerah

Faktor-faktor penghambat retribusi daerah yang nantinya akan dianalisis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah. Menurut Fajar dkk, (2014:133) mengatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat pemungutan Retribusi Daerah yaitu:

a. Faktor Internal

- Kekuatan (Strength) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di daerah memiliki dua (2) tipe pendekatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal ini dimaksudkan agar strategi dapat terimplementasi secara luas dan merata dengan sasaran yang tepat.
- Kelemahan (Weaknes) Dalam data yang diperoleh dari lapangan mengenai kelemahan dari strategi yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten yang menghambat implementasi pemungutan retribusi adalah kuantitas pegawai belum memadai, sumber anggaran yang relatif kurang, sistem informasi dan data yang belum optimal.

b. Faktor Eksternal

- Peluang (Opportunity) Beberapa peluang yang timbul dari luar sehingga mampu menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah, peluang tersebut seperti adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kearifan budaya lokal yang mampu mengelola SDA, adanya sinkronisasi program dinas dengan program LSM, adanya sinergisitas antar SKPD, keterbukaan masyarakat dalam pemungutan retribusi, dibukanya objek retribusi baru yang mampu untuk meningkatkan penerimaan, dan perkembangan fasilitas yang sudah ada terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat.
- Ancaman (Threat) Dengan diketahuinya peluang dalam suatu strategi tentu hal tersebut juga dapat menimbulkan ancaman atau dampak negatif dari peluang tersebut. Adapun ancaman-ancaman yang dapat terjadi yaitu kesadaran masyarakat yang cukup rendah, peraturan dan tarif yang cukup sulit dipahami oleh masyarakat, ketidaksesuaian peraturan retribusi dengan implementasinya, penerimaan retribusi yang tidak sampai ke daerah, dan ketidakjujuran masyarakat dalam pembayaran retribusi.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sering mengalami hambatan baik dari internal maupun eksternal organisasi. Hal ini karena rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan yang sah selama ini disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) disamping itu juga faktor kelembagaan, berupa batasan hukum/regulasi. Selain itu, faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah penerimaan retribusi parkir yaitu kesalahan sistem pengelolaan penerimaan retribusi parkir, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya petugas serta kesadaran wajib retribusi.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang

sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal (1), pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suhanda (2007:156) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

5. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pengelolaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya. Adapun untuk pendapatan daerah antara lain:

- a. Perhitungan yang tersisa dari tahun lalu,
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Walaupun porsi PAD terhadap total penerimaan dana perimbangan wajib sangat kecil (kurang dari 10 persen), namun penerimaan PAD menjadi penting karena merupakan hasil survei dan aliran penerimaan yang berasal dari kota/daerah itu sendiri.

Selain itu, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain laba, dividen dan penjualan saham milik daerah).

Pengelolaan pendapatan asli daerah dilakukan secara optimal, untuk itu dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: :

- a. Meningkatkan cakupan survei (*coverage ratio*), yaitu jumlah wajib pajak terdaftar yang akan dipungut dibandingkan dengan potensi wajib pajak yang sebenarnya di kabupaten/kota, artinya pengertian sasaran penerimaan pajak daerah bertujuan untuk menyelaraskan pajak dengan potensi penerimaan. setiap orang Intesifikasi sumber-sumber yang ada meliputi antara lain:
 - Melakukan pendataan seakurat mungkin pada semua objek dan subyek daerah serta retribusi daerah.
 - Meningkatkan keterampilan dan kemampuan aparatur pimpinan secara profesional.
 - Koordinasi yang lebih baik antar departemen/instansi terkait.
 - Peningkatan konsultasi dan infrastruktur untuk kelancaran pelaksanaan tugas perangkat administrasi.
 - Meningkatkan pengendalian untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Ekstensifikasi yaitu menambah sumber penerimaan pendapatan selain dari sumber-sumber yang sudah ada yang meliputi upaya-upaya antara lain:
 - Mencari sumber pendapatan yang baru yang mempunyai potensi besar.
 - Meminta kewenangan mengelola sumber pendapatan/pembiayaan dari pusat(sebagai wujud ekonomi yang luas).
 - Penerbitan perda-perda baru sesuai dengan sumbernya.

Pelaksanaan anggaran kinerja memerlukan perencanaan belanja dan pengelolaan anggaran daerah, terkait dengan penerapan enam prinsip dasar pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran ke satuan kerja (kantor) dan antar jenis belanja satuan kerja, yaitu:

 - a. Kriteria utama agar suatu program tetap ditawarkan dan digunakan adalah ada atau tidaknya kegagalan dalam implementasinya.
 - b. Total belanja (grand total) seluruh unit kerja harus sejalan dengan kerangka kebijakan ekonomi makro.
 - c. Penyelarasan pengelolaan anggaran antar unit kerja dan dalam berbagai jenis belanja di dalam unit kerja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Penting untuk menganalisis dengan baik dampak program-program penting terhadap masyarakat miskin.
 - e. Alokasi dana untuk belanja rutin dan pembangunan pada setiap program dan bidang harus dianalisis secara terpadu.
 - f. Instansi yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus terus dievaluasi untuk meningkatkan:
 - Tingkat efesiensindari daftar skala prioritas yang diajikan setiap unit kerja.
 - Efisiensi Teknis dalam penggunaan dana yang dianggarkan.

4. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan maksud untuk memberikan gambaran secara tepat keadaan, sifat-sifat suatu individu, gejala kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala ada tidaknya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat, dengan kata lain penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan menjelaskan dan menganalisis tentang gejala-gejala yang akan diteliti mengenai Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Teknis Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada analisis kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1984). Dalam penelitian ini melalui 4 tahap, yakni; Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Data Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk menjelaskan gambaran mengenai Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Jalan A.Y. Patty Kota Ambon, maka peneliti dapat melakukan observasi dilapangan yang kemudian dilakukan pendekatan dan wawancara kepada informan yang hasilnya dapat diuraikan dalam hasil penelitian ini. Adapun variabel tersebut diatas dapat di ukur dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi

UPT Dinas Perhubungan Kota Ambon menyusun target penerimaan jasa retribusi parkir dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan khususnya penerimaan retribusi parkir dimana UPT melakukan penambahan dan perluasan terhadap area/kawasan titik lokasi perparkiran. Hal ini dapat memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan realisasi penerimaan retribusi parkir dengan menambah presentasi yang memungkinkan akan dicapai.

Tabel 13. Target dengan Realisasi Retribusi Parkir Jln. A.Y.Patty Tahun 2019 s/d 2021

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efektivitas |
|-------|---------------|----------------|-------------|
| 2019 | 1.870.000.000 | 1.465.380.000 | 78 |
| 2020 | 2.675.000.000 | 2.230.000.000 | 83 |
| 2021 | 4.600.000.000 | 3.922.640.000 | 85 |

Besarnya peningkatan efektifitas retribusi jasa parkir dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Jasa Parkir}} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{1.465.380.000}{1.870.000.000} \times 100\% = 78\%$$

$$2020 = \frac{2.230.000,000}{2.230.000,000} \times 100\% = 87\%$$

$$2021 = \frac{3.992.640,000}{3.992.640,000} \times 100\% = 85\%$$

Dari penjelasan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun target pada tahun 2021 tidak tercapai secara optimal namun secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi parkir dalam periode 2019-2021 mengalami peningkatan. Oleh sebab itu UPTD dan Dinas Perhubungan Kota Ambon perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi Daerah dan pendapatan asli Daerah (PAD) secara keseluruhan.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Parkir

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pihak terkait, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pelayanan parkir menyangkut dengan lokasi perparkiran belum sesuai dengan standar parkir karena nantinya akan disesuaikan dengan standar dan kondisi yang ada, pemeriksaan dan pendataan lokasi parkir selalu dilaksanakan mengingat jangan sampai ditemukan lahan parkir yang tidak digunakan dan mengganggu arus lalu lintas, Untuk mencegah hal-hal tersebut maka Dinas Perhubungan memberikan peringatan, memberikan tanda larangan agar tidak boleh menggunakan area atau lokasi tersebut untuk lokasi parkir.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan penulis pada Bab sebelumnya mengenai efektivitas pengelolaan penerimaan retribusi parkir di kawasan Jln. A.Y. Patty Kota Ambon, maka dapat disimpulkan berdasarkan pendekatan dan hasil wawancara informan terhadap indikator-indikator yaitu:

1. Dari hasil analisa data menunjukkan bahwa target dan realisasi dalam hal ini mengenai retribusi parkir 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 s/d 2021 terlihat belum optimal berupa : belum efektifnya target dan realisasi karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan- kawasan parkir yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraub keuntungan. Sehingga masih ada kawasan parkir di kawasan Jln. A.Y. Patty Kota Ambon yang tidak memiliki legalitas yang seharusnya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di uptd akan menambah penerimaan retribusi parkir di kawasan Jln. A.Y. Patty Kota Ambon sikap dari juru pungut retribusi parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya.
2. Dari hasil analisa data menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pelayanan parkir dapat dijelaskan bahwa menyangkut dengan lokasi perparkiran

belum sesuai dengan standar parkir karena nantinya akan disesuaikan dengan standar dan kondisi yang ada, pemeriksaan dan pendataan lokasi parkir selalu dilaksanakan mengingat jangan sampai ditemukan lahan parkir yang tidak digunakan dan mengganggu arus lalu lintas, Untuk mencegah hal-hal tersebut maka pihak UPTD Dinas Perhubungan memberikan peringatan, dan juga memberikan tanda larangan agar tidak boleh menggunakan area atau lokasi tersebut untuk lokasi parkir. Maka untuk kedepannya lebih memaksimalkan tempat parkir atau lahan parkir, dan juga akan diusahakan dilakukan perbaikan lahan parkir dan diharapkan akan meningkatkan pendapatan atau retribusi perpajakan pada jalan A.Y. Patty tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai efektivitas pengelolaan penerimaan retribusi parkir di kawasan Jln. A.Y. Patty Kota Ambon, maka peneliti dapat mencoba memberikan saran sebagai berikut: Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengujian kuat tarik belah pada beton.

1. Perlunya Dinas Perhubungan kota Ambon untuk lebih memperhatikan keaktifan kerja dari elemen-elemen pemerintah maupun yang turut serta dalam melakukan kebijakan retribusi tersebut. Dan hendaknya Dinas Perhubungan Kota Ambon dapat mencari solusi atas permasalahan yang menjadi faktor tidak efektifnya retribusi sesuai peraturan daerah (PERDA) mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum khususnya di kawasan Jln. A.Y. Patty Kota Ambon.
2. Perlunya kepada juru parkir dan koordinator lapangan di Kota Ambon khususnya di kawasan Jln. A.Y. Patty Kota Ambon untuk menaati aturan dan ketentuan yang berlaku agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dengan harapan terciptanya ketentraman, ketenangan dan kerapian jalan. Dan juga bagi petugas parkir harus lebih ditekankan untuk menerapkan pemberian karcis sebagai bukti pembayaran bagi setiap pengguna jasa parkir demi menunjang pelaksanaan perpajakan dan pemungutan retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2004. *Hubungan Kewangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Sumber Ilmu: Jakarta.
- Ahmad Yani 2008, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta..
- Abdul Halim. 2007. *Akuntanai Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta
- Anggoro D. Damas 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press: Malang.
- Baldrick Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2.: UPP: Yogyakarta.
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1 Taushia: Jakarta Pusat.

- Dewi S.R. 2013. *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*: Magelang.
- Erni Tisnawati, dkk.. 2009. *Pengantar Manajemen*, Kencana Perdana Media Group: Jakarta. Faizatullailah, Yustica 2013. *Pajak dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Volume 1, Nomor 3. Agustus
- Fajar dkk, 2014. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014*. Economics Development Analysis journal Vol.5 No.2.
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo Jakarta. Hasibuan, Malayu SP, 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. CV. Haji Masagung: Jakarta.
- Kumorotomo, W. 2005. *Erika Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Sari Hayati, 2016. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan Jurnal Terapan Manajemen Bisnis.
- Maribot P. Siahaan 2005, Pajak daerah Dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Maribot P. Siahaan 2011, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi Dan Manajemen Kewangan Daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta Mardiasmo. 2017. Perpajakan. Andi: Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mariyana, Rita, dkk. 2010. Pengelolaan Lingkungan Belajar. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Kewangan Antara Pusat Dan Daerah. UUI Press: Yogyakarta.
- Nadia Azlin, 2013. Analisa Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau Pekanbaru.
- Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia: Jakarta.
- Purnamasari. 2015. Panduan Menyusun Sop Standard Operating Procedure. Kobis (Komunitas Bisnis): Jakarta.
- Steers, M. R. 2015. Efektivitas Organisasi. Erlangga : Jakarta. Siagian, Sondang, P. 2008. Filsafat Administrasi. Bina Aksara: Jakarta. Sukarna, 2011. Dasar-dasar Manajemen. Mandar Maju: Bandung
- Suhunda 2007 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Andalas Lima Sisi: Padang.
- Trianto. 2007. Model Pembelajaran Terpadu Dalam Teori Dan Praktek. Prestasi Pustaka : Jakarta. Tim Prima Pena, 2015. Kamu Besar Bahasa Indonesia Gitamedia Press Jakarta.
- Victor Jusul' Sedubun. 2017. Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah. Deepublish: Yogyakarta.